

BAB I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Aplikasi Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Spesialisasi Hubungan Masyarakat (Humas), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung. Dan setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut diwajibkan untuk melaksanakan Kerja Praktek Lapangan di Instansi Swasta maupun Pemerintahan.

Pelaksanaan PKL ini dimaksudkan agar siswa dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya yang akan dijalani kelak. Dan disini penulis mengambil Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai tempat melaksanakan Kerja Praktek.

Bandung adalah ibu kota Propinsi Jawa Barat. Disini pula letaknya Markas Besar Kepolisian Daerah Jawa Barat Langlangbuana (Llb). Jawa Barat yang berpenduduk 24.772.537 orang (sensus tahun 90-an).

Dengan penduduk yang sedemikian banyaknya Polda Jabar Llb mempunyai 11.411 orang anggota Polri, hal ini berarti bahwa seorang anggota Polri melayani 2500 orang penduduk.

Organisasi Polda/Jabar Llb disusun berdasarkan Skep Kapolri No Pol : Skep/55/VIII/1977 tanggal 1 Juli 1977. Kemudian disempurnakan dengan Skep

Kapolda Jabar Llb No Pol : Skep/82/XII/1977 tentang penyempurnaan prosedur tetap hubungan fungsional prosedural antar unsur-unsur staf Polda Jabar Langlang Buana. Polda sendiri bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kekuatan/kemampuan kesatuannya dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.

Sebagai pengemban tugas negara, Polri Polda Jabar Llb setiap saat selalu berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiap siagaan dengan melaksanakan berbagai operasi, baik secara menyeluruh dan terpadu ataupun berdasarkan fungsinya masing-masing, operasi-operasi yang dimaksud adalah :

1. Operasi Parkit Merah
2. Operasi Buana II
3. Operasi Clurit
4. Operasi Taruna II
5. Operasi Buana III
6. Operasi Gajah
7. Operasi Buana IV
8. Operasi Wanalaga

Polda itu sendiri dalam daerah hukumnya menyelenggarakan tugas pokok yaitu :

- a. Selaku alat negara penegak hokum memelihara serta meningkatkan tertib hokum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a dan b pasal ini.
- d. Selaku kekuatan sosial ikut aktif berperan serta di bidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini.
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.

Organisasi Polda di susun dalam 2 tingkat :

- 1. Tingkat Markas Kepolisian daerah :
 - a. Eselon Pemimpin
 - b. Eselon Staf Pembantu Pimpinan
 - c. Eselon Pelayanan
 - d. Eselon Pelaksana

- 2. Tingkat Komando Pelaksana

Badan-badan ekstra struktural :

- 1. Persatuan isrti anggota Polri Bayangkari disingkat Bhayangkari.

2. Pusat koprasi anggota Kepolisian disingkat KopPol.

Sesuai pula dengan apa yang telah digariskan dalam Rekorfis (Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi) oleh Kapolri, yang mencakup program :

- I. Pemupukan moral dan disiplin
- II. Penyempurnaan dan pelaksanaan Sispulahjianta
- III. Pengintensipan dan pendayagunaan staf
- IV. Intensifikasi pembinaan masyarakat
- V. Penugasan dan penindakan yang selektif.

Polda Jabar Llb mewujudkannya dalam bentuk latihan kesiap siagaan operasional kepolisian yang disebut "GAWISA IV" (Ganda Wibawa Sakti IV).

1.2. Sejarah Lahirnya Polri

Tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari Bhayangkara. Dari Purwokerto pula strategi perjuangan Kepolisian RI direncanakan dan diprogramkan untuk mengendalikan dan menggerakkan potensi kepolisian di seluruh wilayah Nusantara.

Polri berdiri di Purwokerto Jawa Tengah. Secara resmi Polri telah lahir tepatnya tanggal 1 Juli 1946, berdasarkan Keputusan Menteri muda Kepolisian RI, dan di tanda tangani oleh Letnan Jenderal Pol. R. Sumarto. Dan jadilah tanggal 1 Juli diperingati oleh seluruh jajaran aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai *Hari Bhayangkara*.

Berdasarkan catatan sejarah, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terbentuklah 12 Kementrian Dalam Negeri. Secara resmi Kabinet Pertama ini disahkan pembentukannya tanggal 4 September 1945. Kementrian Dalam Negeri pada waktu itu membawahi Kepolisian RI, yang waktu itu masih menggunakan nama Jawatan Kepolisian Negara RI, yang dikepalai oleh RS Soekanto Tjokrodiatmadja, dengan wakilnya R. Soemarto.

Sejak berdirinya Jawatan Kepolisian yang terorganisasi cukup baik berkantor pusat di Jakarta, tapi karena situasi di Jakarta saat itu tengah kacau balau akibat teror yang dilancarkan serdadu-serdadu KNIL dan Sinyo-sinyo Belanda. Jawatan Kepolisian terpaksa pindah ke Purwokerto, bersamaan dengan pindahnya kementrian Dalam Negeri dari Jakarta ke Purwokerto. Kepindahan Kementrian Dalam Negeri ini juga disebabkan adanya kerusakan yang dibuat tentara Sekutu dan NICA Belanda, yang kemudian menguasai daerah Jakarta.

Hal ini pula yang mengakibatkan Pemerintahan Pusat RI yang baru 4 bulan menjalankan pemerintah segera berpindah ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946 sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai Kota Perjuangan RI.

Dengan berpindahnya KDN (Kementrian Dalam Negeri), yang kemudian disusui oleh Jawatan Kepolisian Negara (JKN) dari Jakarta ke Purwokerto pada bulan Februari 1946 menjadikan Purwokerto sebagai pusat segala kegiatan kepolisian, dengan menempatkan markasnya di kompleks bangunan bekas gedung Asisten Residen Hindia Belanda (Sekarang digunakan untuk pertokoan bekas Makodim

0701/Banyumas). Jawatan Kepolisian ini kemudian mulai membangun dan mengkonsolidasikan organisasinya.

Padahal pada saat itu Purwokerto masih diliputi suasana revolusi fisik (perang kemerdekaan) setelah terjadi gerakan lucutan senjata pasukan Jepang. Disusul pula dengan serangkaian peristiwa pembentukan tentara KNIL di daerah. Gerakan pelucutan senjata pasukan Jepang, disusul pula dengan serangkaian peristiwa pembentukan tentara KNIL di daerah Banyumas, pembentukan BKR, penyusunan TKR Divisi V serta pemberangkatan pasukan TKR ke berbagai front pertempuran di luar daerah Banyumas. Keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan organisasi kepolisian RI sebagai instansi pengendali keamanan dalam negeri.

Dalam keprihatinannya, Jawatan Kepolisian RI mengadakan penataan sistem lingkungan kedinasannya termasuk tentang peraturan dan kebijakan di berbagai bidang seperti pakaian seragam, kepangkatan, bagde, dan lain sebagainya. Bahkan sejak 1 Juli 1946 jawatan ini lepas dari kementrian Dalam Negeri dan langsung menempatkan diri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Republik Indonesia. Maka pada tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari Bhayangkara. Dari Purwokerto pula strategi perjuangan Kepolisian RI direncanakan dan diprogramkan untuk mengendalikan dan menggerakkan potensi kepolisian di seluruh wilayah Nusantara.

Di tengah berkecamuknya, revolusi fisik (Perang Kemerdekaan), Kepolisian RI kian mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sekolah pendidikan kepolisian, seperti di Sukabumi, Mertoyudan, dan Magelang meskipun tidak dapat menjalankan

tugas dan kegiatan sepenuhnya karena situasi dan kondisi perang kemerdekaan Jawatan Kepolisian juga ikut menerjunkan anggotanya dalam kancah pertempuran, bersama-sama dengan para pejuang dari berbagai kesatuan dan organisasi lainnya untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara ini.

Termasuk ketika terjadi gencatan senjata (case fire) dalam rangkap persetujuan Renville (Agresi Militer Belanda I) tanggal 21-27 Juli 1947. Saat itu pasukan Belanda telah berhasil menyusup ke daerah pertahanan RI di Karesidenan Banyumas dan Pekalongan. Disusul serangan Belanda dengan pesawat udara ke daerah Purwokerto lewat Sokaraja, dengan melancarkan mortir dan kanonade tanggal 29-31 Juli 1947. Serangan Belanda ini menyebabkan pasukan kepolisian yang tergabung dengan pasukan bersenjata lainnya dibawah komando Mayor Jenderal Gatot Soebroto menyingkir ke Banjarnegara yang masih aman. Sementara itu masih bernama Mobrig juga sudah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda di berbagai daerah lainnya.

Pasukan Mobrig dibentuk oleh Jawatan Kepolisian Negara setelah Agresi Militer Belanda I. Mobrig/Brimob yang merupakan pasukan andalan/tempur seperti polisi istimewa secara resmi didirikan tanggal 14 November 1946 di Purwokerto. Pembentukan kesatuan ini merupakan gagasan/prakarsa dari wakil Kepala Jawatan Kepolisian RI, yaitu R. Soemarto.

Pada bulan Juni 1947 terjadi pergantian Komando Kompi Inspektur Polisi Tk.II RM Bambang Soeprapto, salah seorang tokoh pertempuran 5 hari di Semarang, dipindahkan oleh kesatuannya dari MBK (Markas Besar Kepolisian) Semarang, untuk bergabung dengan MBK Banyumas disertai 30 orang anak buahnya. Tak lama

kemudian Inspektur Polisi (IP) I RM Bambang Soeprapto diangkat sebagai Komandan Kompi Mobrig Banyumas menggantikan R.Hardono. Dua minggu kemudian pasukan Mobrig Banyumas mulai terlibat pertempuran di Jantung Kota Purwokerto dan sekitarnya yang telah diduduki pasukan Belanda sejak tanggal 1 Agustus 1947. Pasukan Mobrig Karesidenan Banyumas pada waktu itu terdiri dari berbagai kesatuan pasukan yang terpisah dari induk pasukannya seperti Hisbullah, ALRI Cilacap, Tentara Pelajar Purwokerto dan beberapa anggota jawatan Kepolisian negara ditambah beberapa siswa Sekolah Inspektur Polisi Mertoyudan.

Dalam perkembangan selanjutnya struktur organisasi Mobrig Banyumas mengalami perubahan menjadi 4 seksi dalam satu kompi, dan disusun pula beberapa tenaga staf komando kompi. Meski pakaian mereka belum bisa diseragamkan, tetapi jumlah anggota dan persenjataannya kian meningkat. Sehingga jika dibandingkan dengan kesatuan TNI/Militer setempat saat itu pasukan Mobrig Banyumas jauh lebih kuat.

Saat terjadi gencatan senjata dalam rangka persetujuan Renville, pasukan Mobrig Banyumas terpaksa harus hijrah ke Banjarnegara. Kemudian pasukan dikonsolidasikan serta disusun kembali keorganisasiannya. Tetapi komandan kompiya tetap, yakni IP I Bambang Suprpto. Dengan keanggotaan MBK Pekalongan 63 orang, MBB Jawatan Kepolisian 12 orang, mereka bergabung ke dalam Kesatuan Mobrig Banyumas. Sehingga bulan Maret 1948 struktur organisasinya berubah lagi, tetapi komandonya tetap Bambang Soeprapto.

Selanjutnya kesatuan Mobrig Polri ini berkembang sebagai pasukan elit Polri, tetap akronim Mobrig(Mobile Brigade) berubah menjadi Brimob (Brigade Mobile) Polri. Pada tahun 1972 Kesatuan Brimob dilikuidasi menjadi kompi-kompi, karena hampir 24 tahun Kesatuan Polri terjebak pada kesatuan Polri terjebak pada pasukan kecil efektif dan Korps Brimob ikut menjadi terpengaruh pada doktrin yang sudah tidak relevan dengan perkembangan keadaan. Tanggal 5 Oktober 1996 dilakukan pemekaran kembali, dan Korps Brimob kemudian dipimpin oleh seorang Brigadir Jendral. Sebelumnya pemekaran korps ini hanya berkekuatan 47 kompi, setelah pemekaran menjadi 67 kompi (perekonomian 60 personil). Sehingga perlu merekrut lagi lebih kurang 1600 anggota untuk ditempatkan di Aceh, Sulawesi Selatan dan Surakarta.

1.3. Sejarah Divisi Humas

Bagian Humas yang berkedudukan di bawah Polda merupakan nama baru yang sebelumnya di kenal sebagai Dispen (Dinas Penerangan).

Pada tanggal 1 Januari 2003 secara resmi Dispen berubah menjadi Humas di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Perubahan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara RI dimana, pasal 7 UU No. 2 Tahun 2002. Dimana Keputusan Presiden tersebut menjadi dasarnya.

Susunan Organisasi Polri sesuai dengan Keputusan Presiden.

Pasal 1 : KNRI (Polri) merupakan Kepolisian Nasional dibawah Presiden langsung.

Pasal 2 : Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum serta memberikan perlindungan, pemngayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 : Susunan Organisasi

1. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan.
2. Organisasi Polri tingkat Pusat disebut Mabes KNRI (Mabes Polri).
3. Organisasi Polri kewilayahan disebut KNRI Daerah (Polda).

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, maka keputusan Kapolri NO. Pol : Kep/07/VII/Tahun 1985. Tanggal 1 Juli Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur badan-badan pada tingkat kewilayahaan KNRI sebagaimana disempurnakan keputusan Kapolri No. Pol. Kep/14/V/2001 Tanggal 25 Mei 2001 dan keputusan Kapolri No. Pol. Kep/15/V/2001 Tangal 25 Mei 2001 tentang penyempurnaan daftar susunan personil dan perlengkapan badan-badan kewilayahan Polri, dinyatakan tidak berlaku.

Humas dikukuhkan oleh keputusan Kapolri :

1. No. Po. Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes KNRI.
2. No. Pol. Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Daerah (Polda).

Itulah yang menjadi dasar perubahan Dispen Menjadi Humas di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda).

Logo Polda Jabar

“ GANDA WIBAWA SAKTI “



I. Ukuran dan Bentuk Pataka

1. Ukuran dan bentuk disesuaikan dengan peraturan Menteri/Pangak No. Pol 4/Prt/Men-Pangak/1967 tentang lambang-lambang kesatuan Angkatan Kepolisian. Bentuknya segi empat panjang dengan ukuran 60 x 90 cm, dibuat dari beludru hitam dengan tepi rumbai kuning emas.

1. Bentuk dan tata lukisan “ PATAKA “

Pada muka kanan lukisan lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bagian-bagiannya disesuaikan dengan pasal 16 No. Pol 4/Prt/Men/Pangak/1967.

- a. Sebuah perisai berwarna kuning emas.
- b. Di dalam perisai terlukis sebuah obor yang bersudut 8 (delapan) terdapat pancaran sinar 17 (tujuh belas) buah dan pada kakinya bersap 5 (lima), yang kesemuanya berwarna kuning emas.
- c. Pada sebelah kanan dan kiri perisai dilingkari oleh setangkai bunga kapas yang berdaun 29 (dua puluh sembilan) lembar dan berbunga 9 (sembilan) buah dan setangkai padi yang berbuah 45 (empat puluh lima) biji yang keseiuruhannya berwarna kuning emas.
- d. Di atas perisai terlukis 3 (tiga) buah bintang masing-masing bersudut lima yang berwarna kuning emas.
- e. Di bawah periasi terlukis sebuah pita berwarna putih yang memuat kata-kata “ RASTRA SEWA KOTTAMA “.

2. Pada muka kiri dilukiskan pada beludru hitam :

- a. Sebuah mangle/rontje yang terdiri dari 18 (delapan belas) bunga tanjung yang berwarna kuning emas.
- b. 18 bunga melati yang berwarna putih perak.

Di atas beludru merah dilukiskan :

- a. Kujang lanang sebelah kanan berwarna kuning emas.
- b. Kujang wadon sebelah kiri yang berwarna kuning emas.
- c. Macan Kumbang berwarna hitam.

3. Segala hal ihwal yang lainnya dissuaikan dengan peraturan tersebut di atas.

II. Tiang Pataka dan Mastaka

1. Tiang Pataka disesuaikan dengan peraturan Men/Pangak pasal 17 No. Pol. 4 Prt/Men-Pangak/1967. dibuat dari kayu Kaboa diberi warna hitam berbentuk bulat panjang dengan ukuran panjang 1,75 meter garis tengah 4 cm.

2. Mastaka terdiri dari :

- a. Burung Rajawali yang lagi terbang melambangkan semangat bangsa Indonesia.
- b. Suatu padma/bangsa yang berlembar lima yang melambangkan Pancasila.
- c. Bunga “ Pancasila “ mempunyai kelopak 3 (tiga) yang melambangkan “ TRI BRATA “.
- d. Tangkai bunga Pancasila terdiri dari segi lima.

Pohon Tanjung mengingatkan jaman kuno/masa lampau sedangkan bunga melati menunjukan aspek ke modernan. Kedua-duanya menghasilkan bunga yang kecil dan harum serta melambangkan ketulusan dan kesucian hati. Kenyataan sekarang menunjukkan bahwa Anggota Polisi tidak saja terdiri dari anggota pria saja melainkan pula terdiri dari anggota wanita yang membuktikan pengalaman hak azasi Warga Negara yang tidak memandang jenis.

Penyesuaian bunga melati dalam bentuk mangle tidak saja didasarkan atas alasan artistic tetapi juga merupakan simbol bahwa di dalam pelaksanaan tugas diperlukan suatu romantika untuk mendapatkan optimisme hidup.

Mangle bunga tanjung melati melambangkan suatu persatuan dan kesatuan dari :

- a. Tenaga halus dan tenaga kasar yang menjadi dasar dari pada kebijaksanaan untuk menimbulkan kewibawaan yang mengandung unsur wedi-asih.
- b. Dua macam bunga yang wangi sebagai lambang dari pada dasar harmoni hidup yang diperlukan untuk menciptakan suasana silih-asih/silih-asah/silih-asuh.
3. Lambang Kujang dihubungkan dengan :
 - a. Kepercayaan di Jawa Barat dimana kujang dianggap sebagai senjata kuno yang spesifik sisa peninggalan karuhun Sunda yang merupakan sebagian daripada cirri sabumi cara sadesa di Jawa Barat.
 - b. Suatu kalimat dalam cerita pantun berbunyi :

“Duhung cirri Lungguh Kujang cirri jaba” dapat ditarik kesimpulan bahwa kujang adalah senjata yang digunakan untuk perang yang serba guna dan dapat digunakan sebagai steek ataupun slagwapen.

Perbedaan antara kujang lanang dan kujang wadon menurut keterangan dari Cirebon bahwa kujang wadon mempunyai dua lekukan yang bentuknya seperti dua prajurit Srikandi dan Banowati, sedangkan kujang lanang tidak mempunyainya.

4. Macan Kumbang dihubungkan dengan :

- a. Cerita sekitar zaman Ratu Galih.
- b. Cerita di sekitar Gunung Sawal, Talaga, Gunung Galunggung, Gunung guntur, Tegal Sancang, Gunung Gede dan lain-lainnya terdapat di Jawa Barat yang mengakui adanya tiga macam macan yang sifatnya mistik magis dan misterius yang kadang-kadang memperlihatkan diri satu persatu atau berkelompok tiga, yang punya warna putih, loreng dan hitam.
- c. Dihubungkan dengan salah satu tokoh cerita pantun yaitu Tokoh Kumbang Bagus Setra di dalam cerita simbolik “ Dadap Malang ”.
- d. Warna putih merah kuning hitam dipakai di dalam Pataka dengan pertimbangan bahwa warna putih merah berasal dari warna bendera pusaka kita dan warna kuning hitam merupakan warna khas dari Angkatan Kepolisian.

Kemudian di dalam ilmu pendalangan maka warna-warna tersebut dapat didengar pada waktu Ki Dalang membacakan murwanya sebagai berikut :

I	II	III	IV
Putih	Merah	Kuning	Hitam
Timur	Selatan	Barat	Utara
Perak	Tembaga	Emas	Besi
Air	Api	Angin	Tanah
Dewa Indra	Dewa Brahma	Dewa Bajus	Dewa Wisnu
Kesucian	Keberanian	Kegiatan	Kekekalan
HA-na-ca-ra-ka	Da-ta-sa-wa-la	Pa-da-ja-ya-nya	Ma-ga-ba-ta-nga

1. Warna putih menurut Ilmu Alam membuktikan bahwa sebenarnya merupakan segala perpaduan dari segala macam warna. Kata Pu ditambah tih dapat dihubungkan dengan empu yang merupakan awalan penghormatan yang diberikan kepada tih, suatu nama yang diberikan kepada Zat hidup seperti terdapat dalam kata getih. Warna putih merupakan lambang kesucian. Bahasa Sunda : “ Clik putih clak herang ” berarti tulus ikhlas.

Warna putih digunakan dalam Pataka ini melambangkan tujuan suci sehubungan dengan tugas Polri dalam pengabdian kepada Nusa Bangsa dan Agama.

2. Warna merah merupakan pula warna Zat hidup. Akan tetapi kesan yang ditimbulkan berlainan sekali dengan kesan yang akibat warna putih. Warna merah melambangkan keberanian, sifat mana yang kadang kadang menggelorakan hati manusia sehingga berkobar-kobar dirasakan sebagai julatan nyala api.

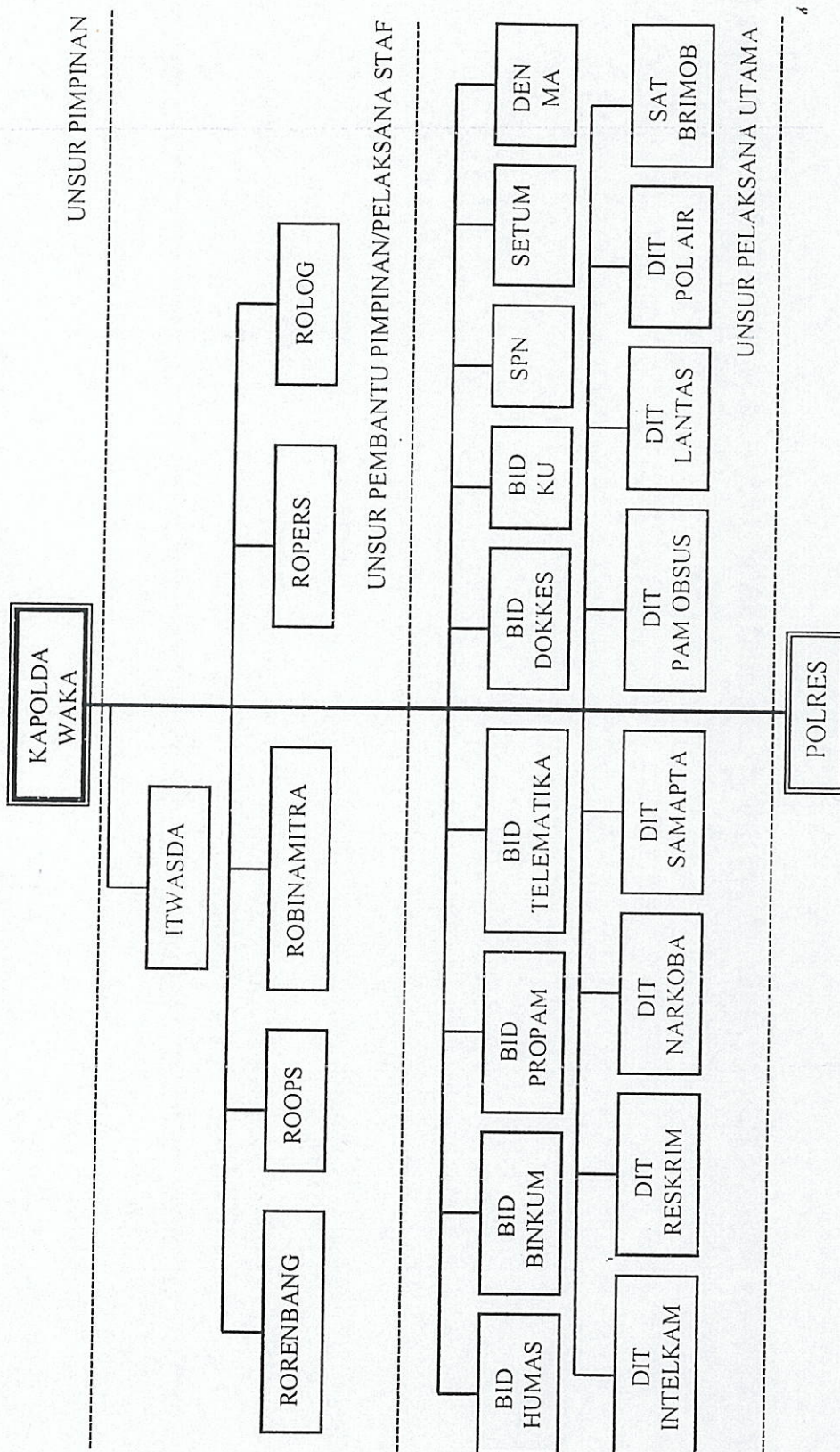
3. Warna kuning melambangkan kegiatan dan keagungan.
4. Warna hitam menurut Ilmu Alam bukan warna melainkan keadaan tanpa warna. Warna apapun bila tidak terkena berkas sinar akan berwarna hitam. Dengan demikian sesuatu benda disebut warna hitam apabila benda itu dapat menyerap semua macam sinar yang menjadi komponen sinar putih. Warna hitam melambangkan ketabahan dan keabadian

III. Sasanti : “ Ganda Wibawa Sakti ”

1. Ganda adalah suatu sifat sari bunga yang mempunyai daya penarik bagi mereka yang menciumnya. Sehingga timbul suatu proses baru yang harmonis karenanya. Begitu pula didalam kehidupan sehari-hari bahwa hubungan antara manusia itu harus didasari dengan sifat ganda tersebut. Sehingga timbul hubungan yang simpatik dan harmonis yang menjadi dasar pada silih asih silih asuh. Silih asih adalah suatu proses terakhir daripada kata asih yang lainnya, yang urut-urutnya adalah : asmara, asih, cinta asih, wedi asih dan silih asih.
2. Di dalam kehidupan Kepolisian sebagai organ yang mengatur pengamanan kedalam yang menimbulkan hubungan yang harmonis dan baik antara pimpinan dan bawahan. Begitu pula tugas Polri keluar sebagai penegak hukum harus/dapat memelihara hubungan tersebut diatas berdasarkan disiplin. Tapi bukan disiplin yang kaku melainkan, suatu disiplin yang mempunyai sifat wedi asih. Dengan perkataan lain bahwa pimpinan mempunyai wibawa terhadap bawahannya.

3. Bila sifat ganda telah dicapai maka timbullah suatu wibawa maka dengan demikian segala usaha dapat diarahkan kesatu tujuan dan bila semua tujuan dapat terlaksana maka timbullah suatu pengertian bahwa pimpinan itu cakti.
4. Pemikiran dan penggalian dari pada atribut-atribut tersebut diatas bersumber kepada sisa-sisa sejarah, ceritera-ceritera, dongeng-dongeng, mantera-mantera, yang berserakan di Jawa Barat. Apakah itu merupakan suatu dichtung oder warheit atau myth or truth itu semua mempunyai fungsi dan tempat didalam pembendaharaan sejarah kebudayaan dan kesusasteraan suatu kelompok manusia yang berada di Jawa Barat. Ini semua perlu kita hargai dan pupuk dikarenakan menjadi suatu bagian dari pada suatu denkstruktur dan denkmethode dari pada suku sunda yang merupakan dari pada kebhinekaan tunggal-ika dari pada bangsa dan kebudayaan Indonesia.

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI POLDA



Dari bagan 1.1 diketahui bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dipimpin oleh seorang Kapolda dan Wakapolda. Dalam melaksanakan tugasnya Kapolda dan Waka sebagai unsur pimpinan dibantu oleh Itwasda dan unsur pembantu pimpinan/ pelaksana staf seperti Rorembang, Roops, Robinamitra, Ropers, dan Rolog yang berada langsung dibawah Kapolda.

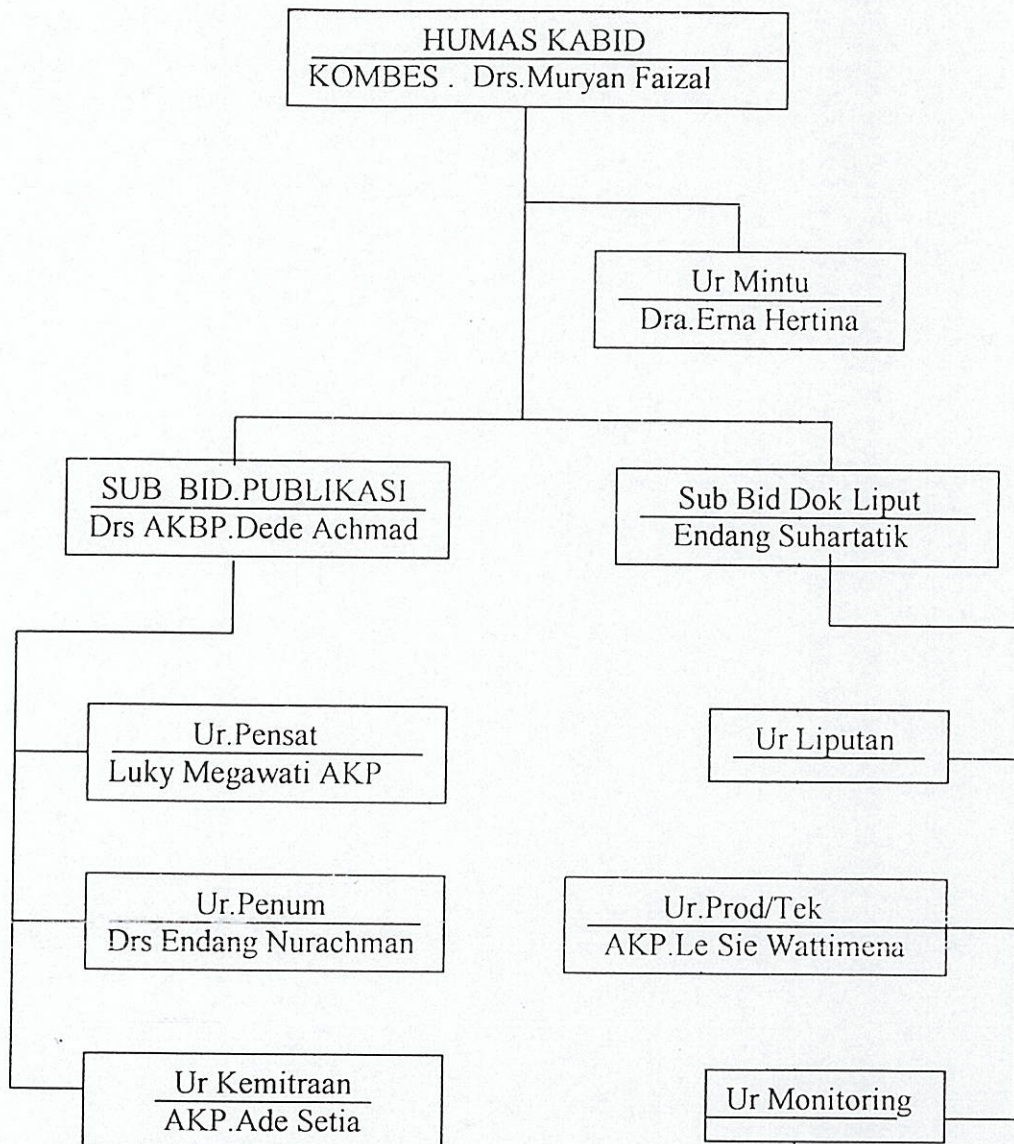
Dalam menjalankan tugasnya para unsur pembantu pimpinan/ pelaksana staf dibantu oleh masing-masing bidang antara lain Bidang Humas, Bidang Binkum, Bidang Propam, Bidang Telematika, Bidang Dokkes, Bidang KU, SPN, Setum, Denma.

Masing-masing bidang membawahi Direktorat (Dit) seperti Dit Intelkam, Dit Reskim, Dit Narkoba, Dit Samapta, Dit Pam Obsus, Dit Lantas, Dit Pol Air serta Satuan Brimob sebagai unsur pelaksana utama. Setelah itu tugas-tugas tersebut diberikan kepada masing-masing Polres dan Polres bertanggung jawab kepada Kapolda.

Bagan 1.2

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG HUMAS

POLDA JAWA BARAT



Dari bagan 1.2 diketahui bahwa :

Bidang Humas Polda Jabar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Humas (Kabid Humas). Dalam menjalankan tugasnya Kabid Humas Polda Jabar dibantu oleh Ur Mintu yang berada langsung dibawah Kabid Humas.

Kemudian untuk menjalankan tugasnya Kabid Humas dibantu oleh dua sub bidang yaitu Sub Bidang Publikasi yang membawahi Urusan Penerangan satuan (Ur. Pensat), Urusan Penerangan Satuan (Ur. Penum), dan Urusan Kemitraan. Dan Sub Bidang Dokliput yang membawahi Urusan Liputan, Urusan Produk/ Teknik dan Urusan Monitoring yang kesemua bagian itu bertanggung jawab kepada Kabid Humas Polda Jabar.

1.7. Job Deskripsi Divisi Humas

1.7.1. Bidang Humas

Bidang Humas memiliki tugas antara lain “

- a. Menyelenggarakan fungsi Humas dengan melakukan pengelolaan dan penyampaian pemberitaan / informasi.
- b. Melakukan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.

1.7.2. Subbid Publikasi

Subbid Publikasi memiliki tugas antara lain :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyampaian informasi baik dilingkungan Polri maupun masyarakat, termasuk kerjasama / kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka membentuk opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.
- b. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dari urusan Pensat, Urusan Penum, dan Urusan Kemitraan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabid Humas.

1.7.2.1. Ur Penum, bertugas untuk :

- a. Menyelenggarakan operasional kehumasan kepada masyarakat.
- b. Menyiapkan materi penerangan umum dengan membuat release kegiatan pimpinan untuk disebarluaskan ke Mass media cetak dan media elektronik.
- c. Menyelenggarakan jumpa pers untuk mengekspose kegiatan keberhasilan tugas Polri.
- d. Memanfaatkan media massa untuk menyiarkan / memberitakan materi penerangan.
- e. Melaksanakan pembetulan dan kontra opini.
- f. Mengkoordinasi dengan media elektronik untuk acara kegiatan dialog interaktif, Talk Show dan sebagainya.
- g. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat pers.
- h. Membuat analisa dan evaluasi terhadap berita dan opini yang berkembang di masyarakat.

- i. Meneruskan kliping Koran kepada pimpinan.

1.7.2.2. Ur Pensat, bertugas untuk :

- a. Menyiapkan materi-materi penerangan pasukan dalam rangka penyelenggaraan penerangan kepada seluruh personil Polri yang bersifat informative, educatif, dan instruktif.
- b. Membuat dan mendistribusikan Pensat Polda Jabar serta meneruskan Pensat Divisi Humas Mabes Polri keseluruh jajaran Polda Jabar.
- c. Memantau dan menanggapi opini yang berkembang di internal Polri.
- d. Melaksanakan operasi pembentukan dan kontra opini internal Polri.
- e. Menyelenggarakan penerangan mobil dan penerangan lapangan bagi internal Polri dalam rangka pemerataan informasi di lingkungan personil Polda Jabar.
- f. Mengkoordinir dan mengendalikan produksi majalah Gawisa serta bertanggung jawab dalam pendistribusian ke seluruh anggota.

1.7.2.3. Ur Kemitraan

- a. Melakukan pembinaan wartawan / pemred dan media massa lainnya.
- b. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan humas instansi terkait.
- c. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan Bidang Humas.

1.7.3. Subbid Dokliput, bertanggung jawab :

- a. Menyelenggarakan peliputan, monitoring, produksi, dan dokumentasi semua informasi / pemberitaan yang berkaitan dengan tugas Polri.

- b. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dari Urusan Liputan, Urusan Produksi dan tehnik, dan Urusan Monitor.
- c. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabid Humas.

1.7.3.1. Ur Liputan, bertugas untuk :

- a. Menyiapkan film, foto / camera, tape dan kaset VHS serta melaksanakan peliputan kegiatan pimpinan dan kegiatan Polda Jabar guna kepentingan bahan penerangan.
- b. Mendokumentasikan foto-foto untuk bahan majalah.
- c. Mendokumentasikan hasil-hasil liputan kegiatan pimpinan dan kegiatan di jajaran Polda Jabar.
- d. Melaksanakan peliputan semua kegiatan masyarakat yang menonjol.

1.7.3.2. Ur Produksi dan Tehnik, bertugas untuk :

- a. Mengadakan / menyiapkan sarana dan materi pemeran.
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan dalam kaitannya penyiapan bahan penerangan seperti : tustel, camera video, camera TV.
- c. Memproduksi semua hasil peliputan maupun hasil monitoring sebagai arsip / dokumen.
- d. Melaksanakan bantuan teknis penyidikan dari hasil liputan dan monitoring sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan.
- e. Menyelenggarakan dokumentasi dan pengelolaan arsip dokumen peliputan.

1.7.3.3. Ur Monitor, bertugas untuk :

- a. Memantau berita media, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri.
- b. Memonitoring setiap ada Public Complain / keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri
- c. Memonitor sampai sejauh mana tanggapan masyarakat ataupun suara kisanan di masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri.
- d. Memberikan tanggapan, sanggahan / meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang dianggap tidak benar dan menempatkan pada proporsi yang sebenarnya (Hak Jawab)

1.7.3.4. Ur Mintu, bertugas untuk :

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi personil, ketatausahaan dalam lingkungan Bidang Humas Polda Jabar.
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang meliputi urusan administrasi, logistik dan keuangan Bidang Humas Polda Jabar.
- c. Pembuatan progiat dan anev progiat.
- d. Pembuatan Laporan Bulanan Bidang Humas Polda Jabar.

1.8. Sarana dan Prasarana

NO	MACAM/JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
A	<u>Senjata Api</u> - Genggam	2	Kabid Humas & Kasubid Publikasi
B	<u>Tanda Kewenangan</u> - Kewenangan Polri besar - " " kecil	3 2	Anggota Polri S d a
C	<u>Ranmor Roda 4</u> 1. Truk Panggung (Dyna) - Sound Sistem - Diesel 2. Daihatsu Feroza 3. Toyota Kijang 4. Mitsubishi Kuda	1 1 1 1 2 1	Di Markas S d a S d a K. Publikasi Kabid Humas & di markas
D	<u>Ranmor Roda 2</u> - Honda GL 100 - Suzuki RC 100 - Millenium	1 1 1	Banum Publikasi Kaur Penum Banum Publikasi
E	<u>Peralatan Kantor</u> - Mesin tik panjang - " " pendek - " " IBM - " stensil - " foto copy - Computer - Lemari besar - " kecil - Rak buku besar - Meja tulis besar - " " kecil - " tamu - Kursi besar - " tamu - " biasa - " lipat	- 1 1 - 1 4 5 1 3 11 12 2 1 2 set 20 10	Di staf S d a S d a S d a S d a Staf/R. Pers Staf S d a Kabid & Staf Kabid & staf S d a S d a Kabid Humas Kabid&K.Pblks Kabid & staf S d a

F	<u>Peralatan Khusus</u>	3	Kaur Liputan
	- Kamera video casette	9	S d a
	- " photo	1	S d a
	- Rewinder VHS	1	S d a
	- Televisi 21"	2	S d a
	- Televisi 14"	1	Sda
	- " 5,5"	2	Staf
	- Tape recorder	1	S d a
	- Proyektor flm	1	S d a
	- " slide	1	Staf
	- Layar proyektor	2	Staf
	- Wareles		
G	<u>Alat komunikasi</u>		
	- Telepon langsung	1	Kabid Humas
	- Telepon Lokal	3	Kabid Humas
	- H T	1	Kabid & Staf
	- Feximille	1	Kabid Humas
	- Mega Phone	1	Staf
H	<u>Lukisan</u>	3	S d a

1.9. Lokasi dan Waktu PKL

PKL ini dilaksanakan di Ur.Pensat Humas Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung 40613. Pelaksanaan PKL selama satu bulan setengah, mulai tanggal 1 Agustus – 13 September 2003, setiap hari kerja (Senin-Jum'at) dari pukul 07.00 s/d 15.00 WIB.

